



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIGI**

(RENSTRA)

TAHUN 2026-2030

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIGI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen RENSTRA ini merupakan wujud dari komitmen kami dalam mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), Renstra ini menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari instansi pemerintah dalam penguatan sistem informasi, peningkatan layanan publik berbasis digital, pengelolaan data statistik sektoral, dan keamanan informasi.

RENSTRA ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja yang meliputi visi dan misi, tujuan program, sasaran, rencana kerja, indicator kinerja utama, dan dokumen penetapan kinerja dari masing-masing penanggung jawab kegiatan. RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213) mengamanatkan bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi yang solid antara berbagai pihak, baik dari internal pemerintah daerah maupun mitra eksternal, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika yang lebih efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Sigi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat daerah	9
2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Kominfo	33
3.2. Strategi Renstra Kominfo	37
3.3. Arah Kebijakan Renstra Kominfo Tahun 2025-2029.....	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	43
4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kominfo.....	43
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra dan Pendanaan Renstra Kominfo	47
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Kominfo	112
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kominfo	114
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kominfo.....	116
BAB V PENUTUP.....	119

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Sigi	19
2. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Sigi berdasarkan Pangkat Golongan	19
3. Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Sigi berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
4. Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika	21
5. Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.....	25
6. Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.....	26
7. Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi	27
8. Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030	34
9. Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030	37
10. Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030	40
11. Tabel 4.1 Program dan Pendanaan Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030	44
12. Tabel 4.2 Rencana Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2026 -2030.....	48
13. Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2026- 2030.....	112
14. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030.....	115
15. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam proses pembangunan daerah adalah perencanaan. Melalui perencanaan, penggunaan sumber daya akan lebih optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 adalah undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan, serta tercapainya tujuan negara dan mampu mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis ditingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah serta merupakan manifestasi kontrak politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (3).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025 – 2029 serta rencana strategis nasional di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam era digitalisasi yang terus berkembang pesat, peran Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) menjadi sangat strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi.

Melalui dokumen ini, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sigi berkomitmen untuk memperkuat sistem informasi pemerintahan, memperluas akses dan keterjangkauan layanan komunikasi, serta mendorong literasi digital di tengah masyarakat. Tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan digital menjadi fokus perhatian yang akan dijawab melalui kebijakan yang tepat dan sinergi antar-stakeholder.

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pemerintahan daerah guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati Sigi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi sesuai Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Memberikan gambaran kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Mempermudah pengawasan dan memberikan arah, pedoman serta landasan bagi jajaran dinas dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi tahun 2025- 2029 adalah :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja setiap 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sigi.

3. Sebagai dasar atau pedoman perencanaan tahunan dan kebutuhan anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat daerah
- 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Kominfo
- 3.2 Strategi Renstra Kominfo
- 3.3 Arah Kebijakan Renstra Kominfo Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kominfo
- 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra dan Pendanaan Renstra Kominfo
- 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kominfo

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kominfo

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi diatur dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi adalah membantu Bupati melaksanakan urusan komunikasi, informatika dan persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Dalam mengemban tugas dan fungsi membantu kepala daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi informatika, persandian dan Statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika, persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi informatika, persandian dan Statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang komunikasi informatika, persandian dan Statistik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dengan baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi perlu mendapat dukungan komprehensif dari seluruh pejabat dan staf yang berkompeten, berkualitas, berintegrasi, berdedikasi dan berloyalitas tinggi serta mempunyai keahlian profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar efektif dan efisien.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi terdiri atas:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Kepala Sub bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;
2. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik, Persandian dan Statistik, membawahi:

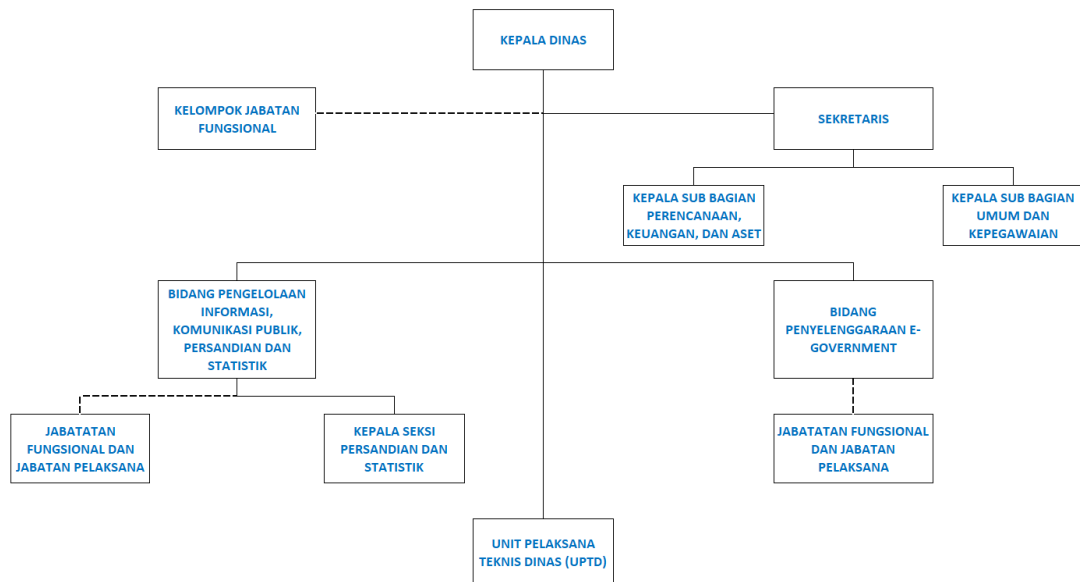
1. Kepala Seksi Persandian Dan Statistik;
2. Jabatatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

d. Bidang Penyelenggaraan *e-Government*, membawahi:

1. Jabatatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sigi



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu kepala daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Sub Bagian, Pejabat fungsional dan Staf.

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan komunikasi, informatika dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
- b) pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informatika dan persandian;

- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, informatika dan persandian;
- d) pelaksanaan administrasi dibidang komunikasi, informatika dan persandian; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu kepala Dinas yang dipimpin oleh sekretaris dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b) Menyusun Rencana Program Kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c) Menyiapkan peraturan perundang-undangan dibidang komunikasi dan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- e) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f) Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

- g) Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1. Sub bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset;

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset bertugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan menyusun program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan keuangan dan asset serta pelaporan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b) Penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e) Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dengan pertanggungjawaban keuangan;
- f) Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g) Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan asset;
- h) Penyiapan bahan pengelola data dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- j) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertugas membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan, surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan dengan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b) Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, akses, taspen dan lain-lain;
- c) Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d) Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e) Fasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g) Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

c) Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik, dan Persandian.

Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi , Komunikasi Publik dan Persandian bertugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik, dan persandian;
- b) Pemberian petunjuk teknis dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang informasi, komunikasi publik dan persandian;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dibidang informasi, komunikasi publik, dan persandian;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik, dan persandian;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang informasi, komunikasi publik, dan persandian;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1. Seksi Persandian Dan Statistik

Seksi Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi Persandian bertugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang persandian;
- b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang persandian;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang persandian;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola persandian;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- h) Penyiapan bahan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- i) Penyiapan bahan pelaksanaan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;

- j) Penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan/asset/ fasilitas/instansi penting/vital/kritis/ melalui kontra penginderaan dan/ atau metode pengamanan persandian lainnya;
- k) Penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan informasi elektronik;
- l) Penyiapan bahan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- m) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang persandian;
- n) Penyusunan laporan pelaksanaan bahan kebijakan dibidang persandian;
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

d) Bidang Penyelenggaraan *e-Government*.

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* dipimpin oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* bertugas membantu kepala dinas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan *e-Government* dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang penyelenggaraan *e-Government*;
- b) Pemberian petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan *e-Government*;
- c) Pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang *e-Government*;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan *e-Government*;
- e) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan *e-Government*;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan unit organisasi maupun antar satuan organisasi serta instansi vertikal di Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan, kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Sigi

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	16	6	22
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	5	2	7
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	2	2	4
4	Tenaga Kontrak	6	7	13
	Total	29	17	46

Pada Tabel 2.1 berdasarkan data jumlah pegawai menurut status kepegawaian dan jenis kelamin, diketahui bahwa total pegawai adalah sebanyak 46 orang, terdiri dari 29 laki-laki dan 17 perempuan.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Sigi berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV			
	IV/b	2	-	2
	IV/a	1	1	2
2	Golongan III			
	III/d	4	1	5
	III/c	1	1	2
	III/b	7	2	9
	III/a	5	2	7
3	Golongan II			
	II/c	2	1	3
	II/b	1	-	1
4	Golongan I X	2	2	4
	Total	25	10	35

Pada tabel 2.2 Berdasarkan pangkat/golongan ruang, jumlah pegawai dengan golongan IV/b ada 2 Orang, IV/a 2 orang, III/d 5 orang, III/c 2 orang, III/b 9 orang, III/a 7 orang, Golongan IX 4 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Sigi berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN	CPNS	PPPK	NON ASN	JUMLAH
1	SMA Sederajat	4			5	9
2	S1	15	7	4	7	33
3	S2	4				4

Pada tabel 2.3 Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SMA Sederajat ada 9 Orang, S1 33 orang, S2 4 orang.

c. Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO	JENIS BARANG		KONDISIBARANG
	G	JUMLAHBARAN	
1	AC Split	3	Baik
2	AC Unit	9	Baik
3	AC Unit	2	Rusak Berat
4	Televisi	2	Baik
5	P.C unit/Komputer	7	Baik
6	P.C unit/Komputer	1	Rusak Berat
7	Printer	6	Baik
8	Printer	1	Rusak Berat
9	Scanner	2	Baik
10	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Baik
11	Modem	1	Baik
12	Peralatan jaringan Lainnya	7	Baik
13	Peralatan jaringan Lainnya	9	Baik
14	Sepeda Motor	5	Baik
15	Sepeda Motor	1	Hilang
16	Mesin pompa air	1	Baik
17	Laptop	10	Baik
18	Laptop	2	Rusak Berat

19	Laptop	3	Hilang
20	UPS	1	Rusak Berat
21	Camera+Attachment	1	Rusak Berat
22	Camera Flem	1	Rusak Berat
23	Peralatan studio video dan Film lain-lain	1	Rusak
24	CCTV	1	Rusak
25	Genset	1	Baik
26	Alat Rumah tangga lainnya	1	Rusak
27	Meja kerja pejabat eselon II	1	Baik
28	Kursu kerja pejabat lainnya	4	Baik
29	Lemari dan arsip pejabat lain-lain	4	Baik
30	Alat komunikasi lainnya	4	Rusak
31	Alat komunikasi Radio SSB lain-lain	1	Rusak
32	Alat komunikasi Radio VHF lain-lain	2	Baik
33	Alat komunikasi Radio VHF lain-lain	4	Rusak
34	Alat komunikasi Radio VHF lain-lain	4	Hilang
35	Lemari besi	1	Baik
36	Filing besi/metal	2	Baik
37	Mesin absensi	1	Baik
38	Lemari kayu	1	Baik
39	Meja biro	10	Baik

40	Meja biro	5	Rusak
41	Meja biro	2	Rusak berat
42	Brangkas	1	Baik
43	Mesin potong rumput	1	Baik
44	Dispenser	3	Rusak berat
45	Hard disk	1	Baik
46	Server	1	Baik
47	Wireless Access Point	1	Baik
48	Meja kerja pejabat eselon III	4	Baik
49	Meja Kerja	7	Baik
50	Meja kerja pejabat eselon II	2	Rusak
51	Meja kerja pejabat eselon IV	2	Baik
52	Kursi tamu	1	Baik
53	Lemari arsip	2	Baik
54	Proyektor + Attachment	1	Hilang
55	Banguna menara Telekomunikasi lain-lain	2	Rusak
56	Asset renovasi	1	Baik
57	Asset renovasi	1	Baik
58	Asset renovasi	1	Baik
59	Asset renovasi	1	Baik
60	Kursi Lipat	1	Rusak Berat
61	Kursi plastic	5	Baik

62	Kursi plastic	15	Rusak Berat
63	Kawat Penghubung	1	Rusak Berat
64	Sound system	1	Baik
65	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
66	Mixer Audio Wisdom MLIVE8	1	Baik
67	Speaker Aktif Portable Baretone	1	Baik
68	Printer	1	Rusak ringan
69	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	Baik
70	Microphone/Boom Stand	1	Baik
71	Camera Film	1	Baik
72	P.C Unit	1	Baik
73	Lap Top	2	Baik
74	Tablet PC	1	Baik
75	Monitor	1	Baik
76	Wireless Access Point	1	Baik
77	Starlink	1	Baik
78	Tripod Camera	1	Baik

d. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja berdasarkan program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi pada periode Renstra tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun ke-					Persentase capaian pada Tahun ke- (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	IKU																
1	Persentase Penurunan Wilayah Blankspot	%		10%	25%	30%	35%	-	10%	25%	30%		-	100%	100%	100%	
2	Persentase penyebaran informasi komunikasi publik PPID, SPAN Lapor dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	%		5%	15%	35%	40%	-	5%	15%	35%		-	100%	100%	100%	

Tabel.2.6
Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun ke-					Persentase capaian pada Tahun ke- (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	IKK																
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	5%	10%	20%	30%	35%	5%	10%	20%	30%		100%	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegritasi	%	-	15%	20%	30%	35%	-	15%	20%	30%		-	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	-	10%	15%	20%	55%	-	10%	15%	20%		-	100 %	100 %	100 %	
4	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	-	-	5%	40%	65%	-	-	5%	40%		-	-	100 %	100 %	
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	5%	40%	65%	-	-	5%	40%		-	-	100 %	100 %	
6	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	-	-	5%	40%	65%	-	-	5%	40%		-	-	100 %	100 %	

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-(Rp)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.042.860.374	3.224.245.320	2.924.920.464	2.989.889.462
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.000.000	-	289.276.000	100.800.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.548.527.821	2.096.895.530	1.653.770.000	1.617.056.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		-	-	12,542,000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		-	-	15,000,000

No	Program	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-(Rp)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.763.655.828	3.070.427.643	2.761.521.501	2.823.576.711
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.450.000	-	283.454.000	100.550.050
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.314.285.943	1.956.945.714	1.641.248.889	1.590.626.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		-	-	12,530,000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		-	-	14,900,000

No	Program	Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.82	95.23	94.41	94.44
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	71.67	-	97.99	99.75
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	84.87	93.33	99.24	98.37
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		-	-	99.90
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		-	-	99.33

e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Sigi untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kabupaten Sigi, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Dinas Kominfo sebagai pusat data center di Kabupaten Sigi tentu saja perlu dorongan *good will* dari pimpinan dan *stakeholder* lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK, yaitu:

1. Tantangan:

- a) Akses internet dan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sigi masih belum merata menghambat implementasi program digitalisasi;
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi secara produktif dan aman;
- c) Masih kurangnya tenaga profesional di bidang TIK dan perencanaan strategis di lingkungan Dinas Kominfo;
- d) Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
- e) Lokasi geografis yang sulit dijangkau dan situasi keamanan yang tidak selalu stabil menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan;
- f) Dana yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk membiayai pengembangan infrastruktur, aplikasi layanan publik digital, dan pelatihan SDM.

2. Peluang:

- a) Meningkatkan penggunaan smartphone di kalangan masyarakat memberikan peluang untuk penguatan literasi digital dan layanan berbasis teknologi;
- b) Kemajuan teknologi komunikasi yang semakin mudah diakses memungkinkan perluasan infrastruktur TIK di daerah tertinggal;
- c) Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan adanya program nasional yang mendukung pengembangan TIK;
- d) Adanya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sigi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten sigi;
- e) Adanya dukungan penuh dari semua stakeholder yang ada di kabupaten Sigi untuk memajukan kesejahteraan Daerah.

2.2 Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Dan Isu Strategis

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika kabupaten Sigi, identifikasi permasalahan dan isu strategis menjadi langkah awal yang penting guna menentukan arah kebijakan yang tepat.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang berdampak pada belum meratanya akses terhadap informasi publik, terutama di wilayah terpencil dan sulit di jangkau. Selain itu rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong partisipasi publik dan mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

Dinas Kominfo juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang TIK, serta alokasi anggaran yang belum memadai untuk mengakselerasi transformasi digital secara menyeluruh serta belum optimalnya sistem pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam integrasi layanan digital, dan juga perlunya penguatan sistem keamanan informasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Oleh karena itu, perumusan dalam pembangunan TIK ke depan perlu diarahkan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, SDM, sistem layanan publik berbasis digitalo, serta tata kelola informasi yang efektif dan aman.

Sebagai gambaran ada beberapa masalah yang akan di uraikan berdasarkan bidang urusan antara lain :

1. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Sebagai bentuk mempercepat digitalisasi di Kabupaten Sigi, urusan Komunikasi dan Informatika berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antar warga, antar wilayah, dan dalam mengembangkan keterbukaan informasi publik. Namun dikarenakan faktor geografis yang cenderung terisolir, Kabupaten Sigi masih menemukan permasalahan terkait dengan komunikasi dan informatika. Permasalahan tersebut yaitu, belum meratanya pembanguna BTS, belum tersedianya jaringan internet dan komunikasi yang layak di beberapa daerah, rendahnya kapasitas SDM telekomunikasi dan internet, masih rendahnya dukungan infrastruktur teknologi informasi, dan masih rendahnya kapasitas aparatur dalam menjalankan e-government.

2. Urusan Bidang Statistik

Permasalahan pokok utama terkait dengan urusan statistik adalah belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral daerah di Kabupaten Sigi. Hal tersebut sangat berdampak pada kondisi ketersediaan data pembangunan di Kabupaten Sigi. Selanjutnya, data merupakan pondasi awal penting dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa permasalahan terkait dengan Urusan Statistik di Kabupaten Sigi yaitu, masih rendahnya pemahaman aparatur terkait kebutuhan data dalam pembangunan, masih rendahnya perhatian aparatur terhadap pentingnya data dalam pembangunan, keterbatasan akses pengumpulan data, masih rendahnya pemahaman aparatur terkait dengan metode statistik pengumpulan data, minimnya data yang akan dilanjutkan pada proses pemeriksaan, dan masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap metode pemeriksaan data.

3. Urusan Bidang Persandian

Di Kabupaten Sigi pelaksanaan urusan persandian belum menunjukkan kinerja yang signifikan. Seperti dengan statistik, urusan persandian juga masih melekat pada Dinas Komunikasi Dan Informatika. Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya layanan persandian akibat dari prosedur penggunaan persandian yang belum terlaksana. Hal tersebut disebabkan karena kondisi seperti kurangnya SDM yang memadai dibidang persandian dan minimnya sarana dan prasarana pendukung. Akan tetapi kondisi terkait dengan Perangkat Daerah lainnya yang belum sepenuhnya aktif juga merupakan salah satu faktor masih belum optimalnya pelaksanaan urusan persandian di Kabupaten Sigi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten Sigi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Sigi menetapkan arah strategis pembangunan melalui peningkatan kualitas layanan informasi, penguatan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan data statistik sektoral yang akurat, serta pengamanan sistem informasi yang mendukung pemerintah Daerah.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan, berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030:

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
- Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan - Meningkatnya Tata Kelola Berbasis Elektronik - Meningkatnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatkan transformasi layanan publik berbasis digital, tata kelola berbasis elektronik dan layanan statistik yang akurat serta handal		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Indeks)	-	0,25	0,27	0,28	0,29	0,31	0,33	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	-	1,60	2,50	3,15	3,46	3,50	4,19	
			Indeks SPBE (%)	0	2,35	2,50	2,65	2,75	2,85	3,00	
		Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis digital di seluruh wilayah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	0	50	55	65	75	85	95	

		Meningkatnya Tata Kelola Dan Manajemen SPBE yang efektif	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	0	50	55	65	75	85	95	
			Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (Orang)	0	0	1	1	1	1	1	
			Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	0	0,37	1,20	1,50	2,60	2,75	3,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan data statistik sektoral dan penerapan Satu Data Indonesia (SDI) di Instansi Pemerintah	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	0	0	50	65	75	85	95	
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	0	50	55	65	75	85	95	
			Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah	0	0	30	35	40	50	60	

			(DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase)								
		meningkatnya efektifitas administrasi kesekretariatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	

3.2 Strategi Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi telah merumuskan tahapan strategi Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025–2029. Tahapan Strategi ini disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika di bidang Komunikasi, informasi, statistik dan keamanan sistem informasi atau persandian.

Di era digital sekarang ini keterbukaan dan layanan informasi publik sangatlah penting, yang akan diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan yang akurat dan terpercaya. Hal ini dilakukan melalui penguatan sistem kehumasan pemerintah, pengembangan media lokal, Pengelolaan data statistik sektoral berbasis kolaborasi dan keamanan informasi dan persandian.

Keamanan sistem informasi menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Tata kelola dan kelembagaan dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Berikut ini adalah tabel penahapan strategi Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Perencanaan Strategis : Melakukan pemetaan	Pembangunan Infrastruktur: Membangun jaringan internet	Perluasan dan Literasi Digital : Memperluas jangkauan	Optimalisasi Layanan Digital : Mengintegrasika	Evaluasi dan Keberlanjutan Program : Melakukan

wilayah, menyusun masterplan digitalisasi, dan menjalin kemitraan dengan penyedia layanan teknologi	dasar (BTS, fiber optik) dan menyediakan akses internet di fasilitas publik.	internet ke daerah terpencil dan melaksanakan pelatihan literasi digital untuk masyarakat.	n sistem informasi desa dan membangun pusat komunitas belajar teknologi.	evaluasi menyeluruh, mendokumentasikan hasil, dan membentuk tim pengelola desa digital untuk kesinambungan program.
Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Sistem : Melakukan identifikasi kebutuhan layanan publik yang paling dibutuhkan masyarakat serta menyusun rancangan sistem aplikasi dan website yang terintegrasi.	Pengembangan Platform Digital Awal : Membangun prototipe awal aplikasi dan website layanan publik, dimulai dari fitur- fitur dasar seperti informasi layanan, pengaduan online, dan formulir digital.	Integrasi dan Penyempurnaan Layanan : Mengintegrasikan berbagai layanan lintas OPD (seperti kependudukan, perizinan, bantuan sosial) ke dalam satu platform digital terpadu yang mudah diakses.	Uji Coba dan Pelatihan Pengguna : Melakukan uji coba sistem di beberapa kecamatan, sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi operator dan edukasi masyarakat terkait penggunaan aplikasi dan website.	Implementasi Penuh dan Evaluasi Layanan : Meluncurkan aplikasi dan website secara resmi untuk seluruh Kabupaten Sigi serta melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan
Melakukan penilaian terhadap infrastruktur keamanan siber yang ada di instansi pemerintah Kabupaten Sigi, serta mengidentifikasi potensi risiko dan celah dalam sistem keamanan data. Menyusun rencana strategis untuk penguatan infrastruktur keamanan siber yang mencakup	Memulai penerapan sistem keamanan dasar di seluruh instansi pemerintah, termasuk firewall, enkripsi data, dan perlindungan terhadap jaringan internal. Melakukan pelatihan awal untuk pegawai pemerintah terkait penggunaan dan pentingnya sistem	Mengintegrasikan teknologi keamanan yang lebih canggih, seperti enkripsi end- to-end dan multi- factor authentication (MFA), untuk melindungi data sensitif. Memperkuat sistem pemantauan dan deteksi ancaman untuk merespon potensi serangan siber secara lebih efektif dan	Melakukan uji coba dan audit keamanan siber secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang telah diterapkan. Memastikan bahwa setiap instansi pemerintah memiliki mekanisme pengawasan yang dapat mendeteksi potensi ancaman atau celah dalam	Berdasarkan hasil audit dan evaluasi, melakukan pembaruan dan penyempurnaan terhadap infrastruktur keamanan siber untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Melakukan pelatihan lanjutan dan simulasi serangan siber untuk meningkatkan kesiapsiagaan

kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, serta kebijakan keamanan yang diperlukan.	keamanan siber.	cepat.	sistem keamanan dengan segera.	pegawai pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman di masa depan.
Penyusunan Rencana Penguatan Sistem Dengan Menyusun rencana penguatan sistem pengumpulan dan pengolahan data, serta identifikasi kebutuhan pelatihan petugas statistik.	Pengembangan Infrastruktur dan Pelatihan Dengan Membangun infrastruktur untuk pengumpulan data dan melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas statistik.	Integrasi Data dan Penerapan Teknologi Dengan Mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menerapkan teknologi untuk mempermudah akses dan verifikasi data.	Penyempurnaan Pengolahan dan Verifikasi Data Dengan Menyempurnakan proses pengolahan dan verifikasi data untuk meningkatkan keakuratan dan validitasnya.	Evaluasi dan Optimalisasi Sistem Dengan Mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem data statistik untuk memastikan akurasi dan keterbaruan data dalam perencanaan pembangunan.

3.3 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KOMINFO KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi 2025-2029 difokuskan pada peningkatan transformasi layanan publik berbasis digital, keamanan informasi dan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan.

Tabel berikut memuat rinciannya mengenai operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
		Memperluas jaringan internet dan akses teknologi di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.	Memperluas jaringan internet dan akses teknologi di seluruh wilayah Kabupaten Sigi.	
		Membangun aplikasi dan website yang terintegrasi untuk layanan publik yang mudah diakses masyarakat.	Membangun aplikasi dan website yang terintegrasi untuk layanan publik yang mudah diakses masyarakat.	
		Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital.	Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital.	
		Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan publik berbasis digital.	Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan publik berbasis digital.	

		Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber: Membangun dan memperkuat infrastruktur keamanan teknologi informasi di seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Sigi, termasuk penerapan sistem keamanan jaringan yang lebih baik, seperti enkripsi data dan firewall, guna melindungi data sensitif dari potensi ancaman siber.	Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber: Membangun dan memperkuat infrastruktur keamanan teknologi informasi di seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Sigi, termasuk penerapan sistem keamanan jaringan yang lebih baik, seperti enkripsi data dan firewall, guna melindungi data sensitif dari potensi ancaman siber.	
		Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Keamanan Informasi: Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk aparatur pemerintah dalam hal pengelolaan dan perlindungan data, agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman dunia maya, serta dapat menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara aman. Implementasi Kebijakan dan Standar Keamanan yang Ketat: Menetapkan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait keamanan informasi dan perlindungan data	Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Keamanan Informasi: Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk aparatur pemerintah dalam hal pengelolaan dan perlindungan data, agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman dunia maya, serta dapat menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara aman. Implementasi Kebijakan dan Standar Keamanan yang Ketat: Menetapkan kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait keamanan informasi dan perlindungan data	

		Penguatan Sistem Data Statistik yang Akurat dan Dapat Diandalkan, meliputi penguatan sistem pengumpulan dan pengolahan data statistik dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber data (sangu data). Memperkuat kapasitas petugas statistik melalui pelatihan berkelanjutan, memastikan integrasi data dari berbagai sumber untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terupdate, serta menerapkan teknologi yang mempermudah akses dan verifikasi data	Penguatan Sistem Data Statistik yang Akurat dan Dapat Diandalkan, meliputi penguatan sistem pengumpulan dan pengolahan data statistik dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber data (sangu data). Memperkuat kapasitas petugas statistik melalui pelatihan berkelanjutan, memastikan integrasi data dari berbagai sumber untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terupdate, serta menerapkan teknologi yang mempermudah akses dan verifikasi data	
--	--	---	---	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kominfo
Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029**

Program Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Sigi 2025–2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai mana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.

Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika terdapat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Program dan Pendanaan Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.949.369. 000,00		5.048.356. 380,00		5.149.323. 507,00		5.252.309. 977,00		5.357.356. 177,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.406.718. 103,00		4.494.852. 465,00		4.584.749. 514,00		4.676.444. 504,00		4.769.973. 394,00	
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	100	4.406.718. 103,00	100	4.494.852. 465,00	100	4.584.749. 514,00	100	4.676.444. 504,00	100	4.769.973. 394,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					200.000.00 0,00		204.000.00 0,00		208.080.00 0,00		212.241.60 0,00		216.486.43 2,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi	0	75	80	200.000.00 0,00	85	204.000.00 0,00	90	208.080.00 0,00	95	212.241.60 0,00	100	216.486.43 2,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

	publik pemerintah daerah (%)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					342.650.89 7,00		349.503.91 5,00		356.493.99 3,00		363.623.87 3,00		370.896.35 1,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (%)	0	2,25	2,35	342.650.89 7,00	2,45	349.503.91 5,00	2,60	356.493.99 3,00	2,75	363.623.87 3,00	3,00	370.896.35 1,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	0	0,37	1,20		1,50		2,60		2,75		3,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					100.000.00 0,00		102.000.00 0,00		104.040.00 0,00		106.120.80 0,00		108.243.21 6,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					100.000.00 0,00		102.000.00 0,00		104.040.00 0,00		106.120.80 0,00		108.243.21 6,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	-	1,60	2,50	100.000.00 0,00	3,15	102.000.00 0,00	3,46	104.040.00 0,00	3,50	106.120.80 0,00	4,19	108.243.21 6,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					100.000.00 0,00		102.000.00 0,00		104.040.00 0,00		106.120.80 0,00		108.243.21 6,00	

2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					100.000.00 0,00		102.000.00 0,00		104.040.00 0,00		106.120.80 0,00		108.243.21 6,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	0	0,37	1,20	100.000.00 0,00	1,50	102.000.00 0,00	2,60	104.040.00 0,00	2,75	106.120.80 0,00	3,00	108.243.21 6,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					5.149.369 .000.00		5.252.356 .380.00		5.357.403 .507.00		5.464.551 .577.00		5.573.842 .609.00	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra dan Pendanaan Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Dinas Komunikasi Dan Informatika” yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana program dan kegiatan OPD dilaksanakan secara efektif, efisien dan berorientasi pada hasil (outcome) dan keluaran (output). Melalui ini Dinas Komunikasi Dan Informatika berupa menyelaraskan arah kebijakan sektoral dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 serta kebijakan nasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penyusunan program kegiatan yang dirancang menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi untuk pencapaian dalam lima tahun kedepan.

Program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi terdapat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2026 -2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.949.369. 000,00		5.048.356. 380,00		5.149.323. 507,00		5.252.309. 977,00		5.357.356. 177,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.406.718. 103,00		4.494.852. 465,00		4.584.749. 514,00		4.676.444. 504,00		4.769.973. 394,00		
Meningkatnya kelancaran administrasi kesekretariatan	Persentase kelancaran administrasi program, keuangan, umum dan kepegawaian (%)	100	100	4.406.718. 103,00	100	4.494.852. 465,00	100	4.584.749. 514,00	100	4.676.444. 504,00	100	4.769.973. 394,00	2.16.2.2 0.2.21.0 1.0000 - Dinas Komunik asi dan Informat ika	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000 ,00		100.000.0 00,00		110.000.00 0,00		110.000.00 0,00		115.000.00 0,00		
Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen	0	1	60.000.000 ,00	1	100.000.0 00,00	1	110.000.00 0,00	1	110.000.00 0,00	1	115.000.00 0,00		

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1		1		1		1		1			

	(Dokumen)													
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	1		1		1		1		1			

	(Dokumen)													
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000 ,00		15.000.00 0,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		20.000.000 ,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1	10.000.000 ,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00	1	20.000.000 ,00		
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				5.000.000, 00		10.000.00 0,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000, 00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00		
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				5.000.000, 00		10.000.00 0,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	0	1	5.000.000, 00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00		

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

	(Dokumen)													
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000 ,00		15.000.00 0,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000 ,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000, 00		5.000.000, 00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00		

2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah				5.000.000, 00		10.000.00 0,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektor Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000, 00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00		
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah				5.000.000, 00		10.000.00 0,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	10	5.000.000, 00	10	10.000.00 0,00	10	10.000.000 ,00	10	10.000.000 ,00	10	10.000.000 ,00		

2.16.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				5.000.000, 00		5.000.000, 00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.080.212. 866,00		2.080.212. 866,00		2.080.212. 866,00		2.080.212. 866,00		2.090.212. 866,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	2.080.212. 866,00	1	2.080.212. 866,00	1	2.080.212. 866,00	1	2.080.212. 866,00	1	2.090.212. 866,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	1		1		1		1		1			

	(Dokumen)													
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.050.212.866,00		2.050.212.866,00		2.050.212.866,00		2.050.212.866,00		2.050.212.866,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	100	2.050.212.866,00	100	2.050.212.866,00	100	2.050.212.866,00	100	2.050.212.866,00	100	2.050.212.866,00		
2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00		

i Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)													
2.16.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00		

2.16.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000, 00		5.000.000, 00		5.000.000, 00		5.000.000, 00		5.000.000, 00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00		
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000, 00		5.000.000, 00		5.000.000, 00		5.000.000, 00		5.000.000, 00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	0	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00		

2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000 ,00		25.000.00 0,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		30.000.000 ,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	20.000.000 ,00	1	25.000.00 0,00	1	25.000.000 ,00	1	25.000.000 ,00	1	30.000.000 ,00		
	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000, 00		10.000.00 0,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		15.000.000 ,00		

Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.16.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian				45.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		

Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	45.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	1	85.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0	1		1		1		1		1			

	Kelengkapan (Paket)													
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan	0	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00		

Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				225.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		355.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	225.000.000,00	1	230.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	355.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	0	2		2		2		2		2			

	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000 ,00		15.000.00 0,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000 ,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00		

2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000 ,00		25.000.00 0,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000 ,00	1	25.000.00 0,00	1	25.000.000 ,00	1	25.000.000 ,00	1	25.000.000 ,00		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000 ,00		15.000.00 0,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000 ,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000, 00		5.000.000, 00		5.000.000, 00		5.000.000, 00		10.000.000 ,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	5.000.000, 00	1	10.000.000 ,00		

2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000 ,00		15.000.00 0,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	15.000.000 ,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.00 0,00		120.000.0 00,00		135.000.00 0,00		185.000.00 0,00		235.000.00 0,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	2	120.000.00 0,00	2	120.000.0 00,00	2	135.000.00 0,00	2	185.000.00 0,00	2	235.000.00 0,00		
2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000 ,00		15.000.00 0,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000 ,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00	1	15.000.000 ,00		

2.16.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1		1		1		1		1			

	(Unit)													
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5		5		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5		1		1		1		1			
2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.16.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.671.505. 237,00		1.684.639. 599,00		1.744.536. 648,00		1.786.231. 638,00		1.784.760. 528,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.671.505. 237,00	1	1.684.639. 599,00	1	1.744.536. 648,00	1	1.786.231. 638,00	1	1.784.760. 528,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1	1		1		1		1		1			

	Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)													
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.641.505.237,00		1.639.639.599,00		1.699.536.648,00		1.741.231.638,00		1.739.760.528,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.641.505.237,00	1	1.639.639.599,00	1	1.699.536.648,00	1	1.741.231.638,00	1	1.739.760.528,00		
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	0	1		1		1		1		1			

	Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	8		8		8		8		8			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	15		15		15		15		15			
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	0	8	85.000.000,00	8	85.000.000,00	8	85.000.000,00	8	85.000.000,00	8	85.000.000,00		

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00		
2.16.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	0	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		

Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)													
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				200.000.00 0,00		204.000.0 00,00		208.080.00 0,00		212.241.60 0,00		216.486.43 2,00		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	80	200.000.00 0,00	85	204.000.0 00,00	90	208.080.00 0,00	95	212.241.60 0,00	100	216.486.43 2,00	2.16.2.2 0.2.21.0 1.0000 - Dinas Komunika si dan Informat ika	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				200.000.00 0,00		204.000.0 00,00		208.080.00 0,00		212.241.60 0,00		216.486.43 2,00		
Jumlah informasi melalui media elektronik dan media massa	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)		1	200.000.00 0,00	1	204.000.0 00,00	1	208.080.00 0,00	1	212.241.60 0,00	1	216.486.43 2,00		

	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas	0	10		15		20		25		30			

	Kominfo (Komunitas)													
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)		30		40		50		50		50			
	Jumlah laporan Dukungan Administratif , Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar		1		1		1		1		1			

	sesuai kriteria/juknis (Media)													
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	3		3		3		3		3			
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi	0	5		5		5		5		5			

	dan komunikasi publik (Persentase)													
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	25		30		35		45		50			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Informasi Masyarakat														
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	10	10.000.000,00	15	10.000.000,00	20	10.000.000,00	25	10.000.000,00	30	10.000.000,00		
2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

	kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)													
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				10.000.000 ,00		10.000.00 0,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	0	5	10.000.000 ,00	5	10.000.00 0,00	5	10.000.000 ,00	5	10.000.000 ,00	5	10.000.000 ,00		
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				25.000.000 ,00		25.000.00 0,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	5	25.000.000 ,00	5	25.000.00 0,00	5	25.000.000 ,00	5	25.000.000 ,00	5	25.000.000 ,00		

2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				30.000.000 ,00		30.000.00 0,00		30.000.000 ,00		30.000.000 ,00		30.000.000 ,00		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomenda si)	0	3	30.000.000 ,00	3	30.000.00 0,00	3	30.000.000 ,00	3	30.000.000 ,00	3	30.000.000 ,00		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				25.000.000 ,00		25.000.00 0,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	25	25.000.000 ,00	30	25.000.00 0,00	35	25.000.000 ,00	45	25.000.000 ,00	50	25.000.000 ,00		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				10.000.000 ,00		10.000.00 0,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		10.000.000 ,00		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik		1	10.000.000 ,00	1	10.000.00 0,00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00	1	10.000.000 ,00		

	pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)													
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)		30	20.000.000,00	40	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				30.000.000,00		34.000.000,00		38.080.000,00		42.241.600,00		46.486.432,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang		2	30.000.000,00	2	34.000.000,00	2	38.080.000,00	2	42.241.600,00	2	46.486.432,00		

	difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				342.650.89 7,00		349.503.9 15,00		356.493.99 3,00		363.623.87 3,00		370.896.35 1,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (%)	0	2,3 5	342.650.89 7,00	2,45	349.503.9 15,00	2,60	356.493.99 3,00	2,75	363.623.87 3,00	3,0 0	370.896.35 1,00	2.16.2.2 0.2.21.0 1.0000 - Dinas Komunik asi dan Informat ika	
	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	0	1,2 0		1,50		2,60		2,75		3,0 0			
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000 ,00		25.000.00 0,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		
Persentase sub domain lingkup pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah	0	1	25.000.000 ,00	1	25.000.00 0,00	1	25.000.000 ,00	1	25.000.000 ,00	1	25.000.000 ,00		

	Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)													
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				317.650.897,00		324.503.915,00		331.493.993,00		338.623.873,00		345.896.351,00		
Jumlah Kunjungan ke website pemerintah kab/sigi	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE	0	2	317.650.897,00	2	324.503.915,00	2	331.493.993,00	2	338.623.873,00	2	345.896.351,00		

	meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	0	1		1		1		1		1			

	(Laporan)													
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	23		23		23		23		23			
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	32		32		32		32		32			
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah	0	32		32		32		32		32			

	Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)													
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan	0	3		5		8		10		15			

	pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)													
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	23		27		30		33		35			
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah	0	1		1		1		1		1			

	daerah (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelengga raan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				25.000.000 ,00		25.000.00 0,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	2	25.000.000 ,00	2	25.000.00 0,00	2	25.000.000 ,00	2	25.000.000 ,00	2	25.000.000 ,00		
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				25.000.000 ,00		25.000.00 0,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		25.000.000 ,00		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi	0	1	25.000.000 ,00	1	25.000.00 0,00	1	25.000.000 ,00	1	25.000.000 ,00	1	25.000.000 ,00		

Manajemen SPBE	pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)													
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	0	32	25.000.000,00	32	25.000.000,00	32	25.000.000,00	32	25.000.000,00	32	25.000.000,00		
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah	0	23	25.000.000,00	23	25.000.000,00	23	25.000.000,00	23	25.000.000,00	23	25.000.000,00		

	Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)													
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0	3	25.000.000,00	5	25.000.000,00	8	25.000.000,00	10	25.000.000,00	15	25.000.000,00		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	23	25.000.000,00	27	25.000.000,00	30	25.000.000,00	33	25.000.000,00	35	25.000.000,00		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

	kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)													
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				17.650.897,00		24.503.915,00		28.493.993,00		30.623.873,00		34.896.351,00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	32	17.650.897,00	32	24.503.915,00	32	28.493.993,00	32	30.623.873,00	32	34.896.351,00		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00		33.000.000,00		36.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur,	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi	0	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	28.000.000,00	2	33.000.000,00	2	36.000.000,00		

peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)													
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

	berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)													
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				100.000.00 0,00		102.000.0 00,00		104.040.00 0,00		106.120.80 0,00		108.243.21 6,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				100.000.00 0,00		102.000.0 00,00		104.040.00 0,00		106.120.80 0,00		108.243.21 6,00		
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangu n Statistik (IPS) (Poin)	-	2,5 0	100.000.00 0,00	3,15	102.000.0 00,00	3,46	104.040.00 0,00	3,50	106.120.80 0,00	4,1 9	108.243.21 6,00	2.16.2.2 0.2.21.0 1.0000 - Dinas Komunik asi dan Informat ika	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100.000.00 0,00		102.000.0 00,00		104.040.00 0,00		106.120.80 0,00		108.243.21 6,00		
Data Statistik daerah yang dikumpulkan,diolah dan di analisis	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik		10	100.000.00 0,00	15	102.000.0 00,00	25	104.040.00 0,00	35	106.120.80 0,00	50	108.243.21 6,00		

	sektoral (%)													
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)		10		15		25		35		50			
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)		2		2		2		2		2			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh	0	10		15		25		35		50			

	pengguna data. (%)													
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	10		15		25		35		50			
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)		10	15.000.000,00	15	15.000.000,00	25	15.000.000,00	35	15.000.000,00	50	15.000.000,00		

2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	10	15.000.000,00	15	15.000.000,00	25	15.000.000,00	35	15.000.000,00	50	15.000.000,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	10	15.000.000,00	15	15.000.000,00	25	15.000.000,00	35	15.000.000,00	50	15.000.000,00		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Kelembagaan Statistik Sektoral														
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)		2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		29.120.800,00		33.243.216,00		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)		10	25.000.000,00	15	25.000.000,00	25	25.000.000,00	35	29.120.800,00	50	33.243.216,00		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				15.000.000,00		17.000.000,00		19.040.000,00		17.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah		1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	19.040.000,00	1	17.000.000,00	1	15.000.000,00		

Daerah	(Laporan)													
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				100.000.00 0,00		102.000.0 00,00		104.040.00 0,00		106.120.80 0,00		108.243.21 6,00		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				100.000.00 0,00		102.000.0 00,00		104.040.00 0,00		106.120.80 0,00		108.243.21 6,00		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	0	1,2 0	100.000.00 0,00	1,50	102.000.0 00,00	2,60	104.040.00 0,00	2,75	106.120.80 0,00	3,0 0	108.243.21 6,00	2.16.2.2 0.2.21.0 1.0000 - Dinas Komunika si dan Informatika	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000 ,00		72.000.00 0,00		74.040.000 ,00		76.120.800 ,00		78.243.216 ,00		
Jumlah SKPD yang tercover layanan keamanan informasi dan Persandian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		1	70.000.000 ,00	1	72.000.00 0,00	1	74.040.000 ,00	1	76.120.800 ,00	1	78.243.216 ,00		

	Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)													
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)		1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)		5		10		15		20		25			
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				10.000.000,00		12.000.000,00		14.040.000,00		16.120.800,00		18.243.216,00		

Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)		1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.040.000,00	1	16.120.800,00	1	18.243.216,00		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)		1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				15.000.000 ,00		15.000.00 0,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		15.000.000 ,00		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunaka n Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)		5	15.000.000 ,00	10	15.000.00 0,00	15	15.000.000 ,00	20	15.000.000 ,00	25	15.000.000 ,00		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				30.000.000 ,00		30.000.00 0,00		30.000.000 ,00		30.000.000 ,00		30.000.000 ,00		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan		1	30.000.000 ,00	1	30.000.00 0,00	1	30.000.000 ,00	1	30.000.000 ,00	1	30.000.000 ,00		

	Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)													
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Jumlah Sandi yang tercover keamanan informasi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan	0	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		

	komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)													
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	0	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, program prioritas ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sub kegiatan yang diidentifikasi dalam Renstra ini difokuskan pada peningkatan kualitas komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, Sistem Statistik Nasional (SSN), dan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tabel berikut ini merinci sub kegiatan prioritas yang akan dijalankan, untuk mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2025-2029.

Tabel 4.3
Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Renstra Kominfo Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
1.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

			2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	

			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
4.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Kominfo Kabupaten Sigi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan utama untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah. IKU ini menjadi

alat ukur yang penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diimplementasikan dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU yang digunakan dalam Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030 mencakup tiga indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Indeks SPBE.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja masing-masing indikator untuk tahun 2025 hingga 2030, dengan harapan bahwa setiap tahun akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kominfo Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika									
2.	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Indeks	-	0,25	0,27	0,28	0,29	0,31	0,33	
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	-	1,60	2,50	3,15	3,46	3,50	4,19	
4.	Indeks SPBE	%	0	2,35	2,50	2,65	2,75	2,85	3,00	

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian yang sangat vital untuk memonitor progres dan efektivitas implementasi kebijakan serta program pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Renstra ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari keselarasan antara RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, hingga penerapan hasil kajian berbasis bukti dalam kebijakan pembangunan daerah. Penekanan pada keselarasan antar dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra PD, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis dengan baik, serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Selain itu, penekanan pada Bidang Komunikasi Dan Informatika sebagai bagian dari pengembangan potensi unggulan daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Dengan menggunakan IKK ini, Kominfo Kabupaten Sigi akan dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, serta memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja untuk setiap indikator yang direncanakan dari tahun 2025 hingga 2030. Pencapaian target-target ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kominfo Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	positif	Indeks	-	0,25	0,27	0,28	0,29	0,31	0,33	
3.	Indeks SPBE	positif	%	0	2,35	2,50	2,65	2,75	2,85	3,00	
4.	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah	positif	%	0	50	55	65	75	85	95	
5.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	positif	%	0	50	55	65	75	85	95	
6.	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	positif	Orang	0	0	1	1	1	1	1	
7.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	positif	%	0	0,37	1,20	1,50	2,60	2,75	3,00	
8.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
9.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	-	1,60	2,50	3,15	3,46	3,50	4,19	

10.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	positif	%	0	0	50	65	75	85	95	
11.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	positif	%	0	50	55	65	75	85	95	
12.	Persentase Publikasi Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	positif	Persentase	0	0	30	35	40	50	60	

BAB V

PENUTUP

Secara umum, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam transformasi digital pemerintahan dan pengelolaan informasi publik, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sigi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat infrastruktur TIK, mengembangkan tata kelola data yang andal, dan memastikan keamanan informasi pemerintah daerah.

Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi ini dapat menggambarkan dan menjabarkan visi RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025 – 2020 yang ditetapkan yaitu **“KABUPATEN SIGI, MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA”**.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang bermanfaat, aplikatif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Sigi, September 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIGI



SAMSIR, S.Kom.,M.Si

NIP. 19790417 200112 1 004



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

**DIGITAL
TRANSFORMATION**